ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 TENTANG AKUNTANSI MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KSPPS TUNAS ARTHA MANDIRI CABANG MALANG

Oleh:

Bobby Mubariq Akhmad

NIM. 155020301111059

Dosen Pembimbing: Prof. Iwan Triyuwono, M.Ec., Ph.D., CA., Ak.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian praktik akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 tentang Akuntansi *Murabahah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjelaskan praktik akuntansi yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Malang serta dibandingkan dengan PSAK 102. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasilnya adalah aspek pengakuan aset *murabahah*, diskon pembelian aset *murabahah*, keuntungan *murabahah* dan pengukuran aset *murabahah* serta piutang *murabahah* tidak sesuai dengan PSAK 102. Aspek pengakuan dan pengukuran aset *murabahah* tidak sesuai karena aset *murabahah* tidak termasuk persediaan. Aspek pengakuan diskon pembelian aset *murabahah* tidak sesuai karena KSPPS TAM Cabang Malang langsung menggunakan harga pokok aset *murabahah*. Aspek pengakuan keuntungan *murabahah* tidak sesuai karena KSPPS TAM Cabang Malang mencatat piutang *murabahah*. Aspek pengukuran piutang *murabahah* tidak sesuai karena piutang terdiri dari harga pokok dan margin. Aspek pengakuan piutang *murabahah*, potongan pelunasan, denda, pengukuran keuntungan *murabahah*, dan penyajian piutang *murabahah* serta margin *murabahah* ditanggihkan sudah sesuai dengan PSAK 102. KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Malang tidak dapat melaksanakan aspek pengungkapan dikarenakan pembatasan wewenang dari kantor pusat. Kesimpulannya adalah aspek pengakuan dan pengukuran tidak sesuai dengan PSAK 102 serta aspek penyajian sudah sesuai dengan PSAK 102.

Kata kunci: *Murabahah*, PSAK 102, KSPPS

ABSTRACT

An Analysis of the Application of PSAK Number 102 Concerning Murabahah Accounting in Murabahah Financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri Branch of Malang

By:

**Bobby Mubariq Akhmad
NIM. 155020301111059**

Advisor:

Prof. Iwan Triyuwono, M.Ec., Ph.D., CA., Ak.

The objective of this research is to analyze the conformity of murabahah financing accounting practices with the Indonesian Financial Accounting Standard (PSAK) number 102 concerning murabahah accounting. This qualitative research uses case study approach in explaining the accounting practices, which consist of recognition, measurement, presentation, and disclosure, of murabahah financing at KSPPS Tunas Artha Mandiri branch of Malang, as compared to the standard. The data was obtained from interviews, documentations, and observations. This study finds that murabahah assets recognition, murabahah asset purchase discount, murabahah profit, and murabahah asset and receivable measurement do not conform to the standard. The murabahah asset recognition and measurement do not comply with the standard because the assets are included in supplies. The recognition of murabahah asset purchase discounts does not comply with the standard because the organization directly uses the assets' purchase price. The recognition of murabahah profit does not comply with the standard because the organization records murabahah receivables. The murabahah asset measurement is incompliant with the standard because it is comprised of purchase price and the margin. The recognition of murabahah receivables, payment discounts, fines, murabahah profit measurement, murabahah receivable presentations, and deferred murabahah margins are in compliance with the standard. KSPPS Tunas Artha Mandiri branch of Malang cannot carry out disclosures due to authority limitation by the head office. Therefore, it is concluded that the organization has not complied with PSAK 102 in terms of recognition and measurement, but it has complied with the standard in terms of presentation.

Keywords: murabahah, PSAK 102, KSPPS

PENDAHULUAN

Setelah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan mulailah di Indonesia banyak bermunculannya Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berkembang secara pesat (Santi, 2018). Perkembangan lembaga keuangan syariah yang pesat tidak hanya terjadi pada bank, namun juga terjadi pada non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yang berkembang pesat adalah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2018) menyampaikan bahwa jumlah koperasi simpan pinjam mencapai 20.852 unit usaha, dimana dari jumlah tersebut 22,29% merupakan KSPPS. KSPPS memberikan peranan yang sangat besar dalam mensejahterakan masyarakat antara lain dengan meminjamkan dana untuk kegiatan usaha nasabah (Puspitasari, 2018).

Pembiayaan *murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001). Berdasarkan PSAK No. 102 *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Dalam melakukan pencatatan pembiayaan *murabahah* harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang *murabahah*. Hal tersebut menjadi sebuah kewajiban karena PSAK sebagai panduan yang mengacu

pada pembuatan laporan keuangan yang andal, akurat, relevan dan berkualitas untuk mendapatkan informasi tentang kondisi ekonomi serta dapat digunakan dalam mengambil keputusan (Nursoleha, Fauziah dan Fitriah, 2015). Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, dengan adanya laporan keuangan yang baik dapat menghasilkan tingkat kesehatan yang tinggi untuk KSPPS.

Namun, masih ditemukan pencatatan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah belum sesuai dengan PSAK No. 102. Penelitian oleh Fitriah (2017) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK No. 102 pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin dalam pengakuan dan pengukuran nilai piutang *murabahah*. Penelitian oleh Parno dan Tikawati (2016) menunjukkan bahwa KPN IAIN Samarinda belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102 dalam hal tidak ada perlakuan akuntansi ketika terjadi tunggakan dan penerimaan angsuran tunggakan.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Malang. Penelitian dilakukan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Malang karena KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Malang merupakan sebuah cabang dari KSPPS Tunas Artha Mandiri yang memiliki jumlah pembiayaan

murabahah yang cukup tinggi dan cenderung mengalami tren peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Malang meningkat dari bulan september 2019 yaitu sebesar Rp1.000.006 menjadi Rp1.593.000 di bulan oktober 2019. Selain itu, pembiayaan *murabahah* sampai saat ini menjadi satu-satunya pembiayaan yang tersedia di KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Malang, maka dari itu diperlukan pencatatan akuntansi yang benar dalam pembiayaan *murabahah*. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui apakah KSPPS tersebut sudah menerapkan standar akuntansi yang berlaku, khususnya PSAK No. 102 Sehingga judul penelitian ini adalah “**Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Malang**”.

TELAAH PUSTAKA

Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah suatu akad/jual beli barang dengan biaya pembelian ditambah keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli barang, dimana penjual menyebutkan dan menjelaskan biaya pembelian barang tersebut kepada pembeli. Menurut Usmani (dikutip oleh Parno dan Tikawati, 2016, hal. 299) mengungkapkan bahwa *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan

Nurhayati dan Wasilah (dikutip oleh Ningsih, 2011, hal. 18) memberikan pendapat bahwa *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Sumber Hukum *Murabahah*

Sumber hukum yang menjadi dasar diterapkannya *murabahah* adalah ayat-ayat Alquran, hadis, ijma'ulama, dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

1. Alquran

Sumber hukum yang pertama adalah Alquran. QS. Al-baqarah ayat 275 sebagai landasan dalam *murabahah* adalah:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

2. Hadis

Hadis yang menjadi pedoman penerapan *murabahah* adalah Hadis Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib (dikutip oleh Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah*, 2000, hal. 2):

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.’”

3. Ijma' Ulama

Ibnu Rusyd (dikutip oleh Fatwa DSN MUI Tentang Murabahah, 2000, hal. 3) menyatakan bahwa ijma mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara *Murabahah*.

4. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan *murabahah*. Fatwa tersebut adalah Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000.

Rukun dan Ketentuan *Murabahah*

Rukun dan ketentuan *murabahah* meliputi (Nurhayati dan Wasilah, 2015):

1. Pelaku

Pelaku adalah pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dalam *murabahah*, pelaku terdiri atas 2 (dua) pihak, yaitu penjual dan pembeli. Para pelaku *murabahah* baik penjual maupun pembeli harus cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2. Objek Jual Beli

Syarat objek jual beli adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai.

3. Barang dimiliki oleh penjual.
4. Barang diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian di masa depan.
5. Barang diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli
6. Barang diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas
7. Harga barang jelas
8. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual

3. Ijab Kabul

Ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan *Murabahah* Menurut PSAK 102

Pengakuan dan Pengukuran

Berdasarkan PSAK 102, perlakuan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran *murabahah* meliputi

1. Pembelian Aset *Murabahah*

A. Aset *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan

Jurnal:

Aset Murabahah

Kas

B. Aset *murabahah* dapat menurun nilainya dikarenakan adanya usang, rusak, atau kondisi lainnya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat maupun

pesanan tidak mengikat terdapat persamaan, bahwa penurunan nilai mengurangi nilai aset *murabahah*. Sedangkan perbedaannya adalah untuk *murabahah* pesanan mengikat, penurunan nilai berlaku sebagai beban dan untuk *murabahah* pesanan tidak mengikat, aset dinilai dari biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, dipilih mana yang lebih rendah. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya berlaku sebagai kerugian.

Jurnal (penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan mengikat):

Beban Penurunan Nilai

Aset Murabahah

Jurnal (penurunan nilai untuk *murabahah* pesanan tidak mengikat):

Kerugian Penurunan Nilai

Aset Murabahah

2. Diskon pembelian aset *murabahah*

a) Terjadi sebelum akad, diskon mengurangi biaya perolehan aset.

Jurnal:

Aset Murabahah (harga perolehan – diskon)

Kas

b) Terjadi setelah akad dan terdapat kesepakatan, maka penjual memberikan diskon tersebut kepada pembeli selama pembeli dapat dijangkau, jika pembeli sudah tidak terjangkau diskon diakui sebagai dana kebajikan (disepakati diskon menjadi milik pembeli). Selain itu,

diskon dapat juga berlaku sebagai tambahan pendapatan *murabahah* (disepakati diskon menjadi milik penjual).

Jurnal (diskon menjadi milik pembeli):

Kas

Utang

Jurnal (pemberian diskon kepada pembeli selama pembeli terjangkau):

Utang

Kas

Jurnal (diskon berubah menjadi dana kebajikan jika pembeli tidak terjangkau):

Utang

Kas

Dana Kebajikan-Kas

Dana Kebajikan-Potong Pembelian

Jurnal (diskon menjadi milik penjual):

Kas

Pendapatan Murabahah

- c) Jika terjadi setelah akad dan tidak ditentukan dalam akad, menjadi milik penjual sebagai pendapatan operasional lain.

Jurnal:

Kas

Pendapatan Operasional Lain

3. Piutang *murabahah* dinilai sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati pada saat akad dan dinilai sebesar saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang saat akhir periode laporan keuangan.

Jurnal piutang *murabahah* pada saat akad:

Piutang *murabahah*

Aset *Murabahah*

Margin *Murabahah* Tangguhan

Jurnal penyisihan piutang tak tertagih:

Beban Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang Tak Tertagih

4. Jika sepanjang masa angsuran tidak melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan *murabahah* diakui pada saat terjadinya akad. Jika melebihi, keuntungan diakui secara proporsional dengan kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*.

Jurnal (keuntungan *murabahah* tidak melebihi satu periode):

Kas

Piutang *Murabahah*

Aset *Murabahah*

Pendapatan Margin *Murabahah*

Jurnal penjualan kredit (keuntungan *murabahah* lebih dari satu periode):

Piutang *Murabahah*

Aset *Murabahah*

Margin Murabahah Tangguhan (akun kontra piutang murabahah)

Jurnal penerimaan angsuran (keuntungan *murabahah* lebih dari satu periode):

Kas

Piutang Murabahah

Margin Murabahah Tangguhan

Pendapatan Margin Murabahah

5. Potongan pelunasan diberikan saat pembeli melunasi tepat waktu atau lebih cepat dan berlaku sebagai pengurang keuntungan *murabahah*. Jika diberikan saat pelunasan, mengurangi keuntungan *murabahah*. Jika diberikan setelah pelunasan, penjual membayarkan potongan pelunasan tersebut kepada pembeli.

Jurnal potongan diberikan saat pelunasan:

Kas

Margin Murabahah Tangguhan

Piutang Murabahah

Pendapatan Margin Murabahah (Saldo Margin Murabah Tangguhan –
Potongan)

Jurnal penerimaan piutang (potongan diberikan setelah pelunasan):

Kas

Margin Murabahah Tangguhan

Piutang Murabahah

Pendapatan Margin Murabahah (Saldo Margin Murabah Tangguhan)

Jurnal pengembalian kepada pembeli (potongan diberikan setelah pelunasan):

Pendapatan Margin Murabahah

Kas

6. Denda dikenakan ketika pembeli lalai dalam melakukan kewajiban dan berlaku sebagai dana kebajikan.

Jurnal:

Dana Kebajikan-Kas

Dana Kebajikan-Denda

Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. harga perolehan aset *murabahah*;
- b. janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Biklen (dikutip oleh Emzir, 2010, hal. 2-4) mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah diselenggarakan dengan kondisi aktual, berbentuk deskriptif, menitikberatkan pada proses, induktif sebagai model analisis data, dan menitikberatkan pada makna. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti langsung dari lokasi penelitian melalui sumber pertama (responden atau informan, melalui wawancara) atau melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti (Martono, 2016).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data primer adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan lisan kepada seseorang (informan atau responden) (Martono, 2016). Informan dalam penelitian ini adalah Fira, seorang akuntan *murabahah* pada KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Malang dan Tarmuji, seorang staf KSPPS Tunas Artha Mandiri Cabang Malang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2016). Dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Standar Operasional Perusahaan (SOP), jurnal dan laporan keuangan terkait *murabahah*.

3. Observasi

Peneliti mengamati di lingkungan kerja kemudian mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan tersebut. Dari data-data tersebut, akan dihasilkan sebuah penafsiran tentang kegiatan-kegiatan obyek penelitian. Observasi dilakukan terhadap jurnal dan laporan keuangan terkait *murabahah*.

Teknik Analisis Data

Berikut ini langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Mengumpulkan data

Data yang dikumpulkan adalah data yang relevan, berasal dari hasil berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan informan, observasi peneliti, dan dokumentasi yang berhubungan dengan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Cabang Malang.

2. Mereduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Melakukan analisis praktik pencatatan jual beli *murabahah* pada obyek penelitian dengan cara membandingkan dan mengevaluasi praktik pencatatan jual beli *murabahah* dengan konsep berdasarkan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* khususnya dalam aspek pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan *murabahah*.
4. Menarik kesimpulan atau verifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

PEMBAHASAN

Studi Kasus Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri (KSPPS TAM) Cabang Malang

1. Akad

KSPPS TAM Cabang Malang bersedia memberikan pembiayaan seharga Rp 7.440.000 dengan Rp 6.000.000 sebagai harga beli aset dan Rp 1.440.000 sebagai margin untuk KSPPS TAM Cabang Malang (margin 24%). Jangka waktu *murabahah* selama 1 tahun. Perhitungan angsuran bulanan adalah sebagai berikut:

Angsuran bulanan = angsuran pokok + angsuran bagi hasil

= (harga beli aset / jangka

waktu pembiayaan) + (margin *murabahah* / jangka

$$\begin{aligned}
& \text{waktu pembiayaan)} \\
& = (6.0000.000 / 12) + (1.440.000 / 12) \\
& = 500.000 + 120.000 \\
& = 620.000
\end{aligned}$$

Jurnal yang dicatat KSPPS TAM Cabang Malang adalah:

1. Jurnal Pokok

Piutang Murabahah Bulanan	6.000.000	
		Kas Teller Capem
		6.000.000

2. Jurnal Pokok + Margin

Piutang Murabahah Bulanan	1.440.000	
		Margin MBA Dit/Ditangguhkan Bulanan
		1.440.000

2. Penerimaan setoran angsuran dan denda

Dalam menghitung margin pembiayaan *murabahah* bulanan di KSPPS TAM Cabang Malang atas nama Bapak Sumarno menggunakan *flat rate* sebesar 24%.

Perhitungan margin tersebut sebagai berikut:

Jurnal margin adalah jurnal yang dicatat oleh KSPPS TAM Cabang Malang untuk mencatat terjadinya keuntungan *murabahah*. Jurnal tersebut adalah sebagai berikut:

Margin MBA dit/ditangguhkan bulanan xxx (sebesar angsuran bagi hasil)

Piutang *murabahah* bulanan xxx (sebesar angsuran bagi hasil)

3. Potongan Pelunasan

Potongan diberikan kepada anggota pembiayaan *murabahah* bulanan yang melunasi angsurannya lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Potongan tersebut mengurangi margin *murabahah*. Peneliti memberikan contoh perhitungan potongan pelunasan adalah sebagai berikut: Seorang anggota memiliki sisa pokok sebesar Rp 13.580.000 dan angsuran margin sebesar Rp 425.000 dengan jangka waktu pembiayaan 24 bulan. Anggota tersebut hendak melunasi seluruh angsurannya saat memasuki pembayaran angsuran yang ke 13. Maka anggota tersebut mendapatkan potongan pelunasan sebesar:

- a) Sisa angsuran: Rp 13.580.000
- b) Margin yang seharusnya: Rp 5.100.000
- c) Potongan pelunasan: Rp 2.040.000
- d) Margin yang diterima: Rp 3.060.000
- e) Pelunasan: Rp 17.065.000

Jurnal yang dicatat KSPPS TAM Cabang Malang adalah:

Kas Teller Capem	17.065.000
Piutang Murabahah Bulanan	13.580.000
Pendapatan Margin MBA Bulanan	3.485.000

5. Penyajian

KSPPS TAM Cabang Malang menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai neto yaitu (saldo awal – penyisihan penghapusan aktiva) + pembiayaan baru – akumulasi angsuran total. KSPPS TAM Cabang Malang menyajikan margin MBA dit/ditanggung sebagai pengurang piutang *murabahah*.

6. Pengungkapan

Aspek pengungkapan terdapat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). CALK hanya dimiliki oleh kantor pusat, sehingga tiap cabang tidak mempunyai CALK. Maka dari itu, KSPPS TAM Cabang Malang tidak mempunyai CALK karena adanya pembatasan wewenang dari kantor pusat.

Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS TAM

Cabang Malang

No	Aspek	Praktik <i>Murabahah</i> di KSPPS TAM Cabang Malang	PSAK 102	Ket.	Alasan Ketidaksesuaian
1	Perolehan aset	KSPPS TAM Cabang Malang menerima dan menyimpan bukti transaksi pembelian aset <i>murabahah</i>	Aset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan (paragraf 18)	Tidak Sesuai	Aset <i>murabahah</i> tidak termasuk persediaan KSPPS TAM Cabang Malang
2	Diskon pembelian aset <i>murabahah</i>	KSPPS TAM Cabang Malang tidak mencatat diskon pembelian aset <i>murabahah</i>	diskon pembelian aset <i>murabahah</i> diakui sebagai: <ul style="list-style-type: none"> a) Pengurang biaya perolehan aset <i>murabahah</i>, jika terjadi sebelum akad <i>murabahah</i> b) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli c) Tambahan keuntungan <i>murabahah</i>, jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad menjadi hak penjual; atau 	Tidak Sesuai	Aset <i>murabahah</i> dijual sebesar harga pembelian, sehingga tidak ada diskon pembelian yang dicatat

			d) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad (paragraf 20)		
3	Piutang <i>murabahah</i>	KSPPS TAM Cabang Malang menjumlahkan harga beli dan margin dalam perhitungan piutang <i>murabahah</i>	Pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan aset <i>murabahah</i> ditambah keuntungan yang disepakati (paragraf 22)	Tidak Sesuai	Piutang <i>murabahah</i> meliputi harga pokok dan margin
4	Keuntungan <i>murabahah</i>	KSPPS TAM Cabang Malang tidak mengakui keuntungan <i>murabahah</i> Keuntungan <i>murabahah</i> dihitung dengan membagi margin <i>murabahah</i> dengan jangka waktu pembiayaan	Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (paragraf 24)	Tidak Sesuai	KSPPS TAM Cabang Malang mencatat piutang <i>murabahah</i> ketika terjadi keuntungan <i>murabahah</i> , sehingga tidak ada keuntungan <i>murabahah</i> yang dicatat
5	Potongan pelunasan	KSPPS TAM Cabang Malang memberikan potongan pelunasan pada saat pelunasan dan potongan tersebut tidak mengurangi margin <i>murabahah</i>	Pemberian potongan pelunasan piutang <i>murabahah</i> dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut: a) Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang <i>murabahah</i> dan	Tidak Sesuai	Tidak adanya akun margin MBA dit dalam posisi debit di jurnal pelunasan, menunjukkan bahwa saldo margin <i>murabahah</i> tidak berkurang meski telah

			keuntungan <i>murabahah</i> ; atau b) Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli (paragraf 27)		terjadi potongan pelunasan
6	Denda	KSPPS TAM Cabang Malang melakukan verifikasi dalam membuktikan kelalaian pada anggota KSPPS TAM Cabang Malang mengakui denda sebagai dana sosial/taawun, yang memiliki fungsi yang sama dengan dana kebajikan	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad Denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan (paragraf 29)	Sesuai	-
7	Penyajian	KSPPS TAM Cabang Malang menyajikan piutang <i>murabahah</i> sebesar nilai neto KSPPS TAM Cabang Malang menyajikan margin MBA dit/ditanggungguhan	Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan (paragraf 36) Margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang (<i>contra account</i>) piutang <i>murabahah</i>	Sesuai	-

		sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>	(paragraf 37)		
--	--	---	---------------	--	--

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dalam studi kasus pembiayaan *murabahah* di KSPPS Tunas Artha Mandiri (KSPPS TAM) Cabang Malang terdiri atas akad, pembelian aset *murabahah*, penerimaan setoran angsuran dan denda, potongan pelunasan, penyajian, dan pengungkapan.
2. Analisis pembiayaan *murabahah* di KSPPS TAM Cabang Malang dilakukan terhadap empat aspek, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
3. Aspek pengakuan piutang *murabahah* dan denda dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS TAM Cabang Malang sudah sesuai dengan PSAK 102.
4. Aspek pengakuan aset *murabahah*, diskon pembelian aset *murabahah*, keuntungan *murabahah*, dan potongan pelunasan dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS TAM Cabang Malang tidak sesuai dengan PSAK 102.
5. Aspek pengukuran keuntungan *murabahah*, aset *murabahah*, dan piutang *murabahah* dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS TAM Cabang Malang tidak sesuai dengan PSAK 102.

6. Aspek penyajian pembiayaan *murabahah* di KSPPS TAM Cabang Malang sudah sesuai dengan PSAK 102.
7. Tidak terdapat aspek pengungkapan pembiayaan *murabahah* di KSPPS TAM Cabang Malang. Hal tersebut terjadi karena KSPPS TAM Cabang Malang tidak mempunyai Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). KSPPS TAM Cabang Malang tidak mempunyai CALK dikarenakan adanya pembatasan wewenang dari kantor pusat

Keterbatasan Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dan melakukan pengumpulan data melalui wawancara. Keterbatasan penelitian ini adalah subyektifitas yang ada pada peneliti. Penelitian ini sangat bergantung pada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara, maka dari itu kecenderungan bias masih tetap ada. Selain itu, karena minimnya jumlah informan yaitu hanya satu orang sehingga peneliti mengalami kesulitan ketika akan memastikan kebenaran data hasil wawancara tersebut. Untuk meminimalisir bias, maka dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan melalui *cross check* data dengan informan yang berbeda, yaitu Dewan Pengawas Syariah dan staf KSPPS TAM. Triangulasi metode dilaksanakan dengan menggunakan metode lainnya dalam pengumpulan data, yaitu dokumentasi dan observasi.

Saran Untuk Penelitian Berikutnya

A. Pihak-pihak yang memanfaatkan hasil penelitian

1) KSPPS TAM Cabang Malang

Diharapkan KSPPS TAM Cabang Malang dalam melakukan aktivitas pencatatan mengikuti standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 102 agar kepercayaan anggota terhadap KSPPS TAM Cabang Malang dapat terjaga dengan baik.

2) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Diharapkan IAI dapat memberikan sosialisasi dan pembinaan PSAK 102 kepada KSPPS TAM Cabang Malang agar aktivitas akuntansi di KSPPS TAM Cabang Malang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dapat tercapai.

B. Arahan untuk penelitian berikutnya

1) Disarankan peneliti berikutnya untuk memilih salah satu jenis pembiayaan *murabahah* agar peneliti dapat lebih fokus dalam melakukan penelitian.

2) Disarankan peneliti berikutnya melakukan penelitian pada jenis pembiayaan jual beli yang lain seperti *salam* dan *istishna* agar lebih banyak variabel yang dipelajari dan dapat dibandingkan hasilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Santi, D. (2018). Konsep Jual Beli Aset Dalam PSAK Syariah 102 Studi Pada PT Bank Muamalat Sungailiat (Skripsi, Universitas Bangka Belitung, Indonesia). Diakses dari <http://repository.ubb.ac.id/1929/>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2018). Data_Dukung_Rakornas_2019_Deputi_Bidang_Pembiayaan. Diakses dari website Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia:

http://pembiayaan.depkop.go.id/index.php/public/download/process_download/39

Puspitasari, T. (2018). Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mandiri Perkasa Sejahtera Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Prigi Watulimo Trenggalek (Skripsi, IAIN Tulungagung, Indonesia). Diakses dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7572/>

Soemitra, A. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Prenada Media

Antonio, M.S. (2001). Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press

Ikatan Akuntan Indonesia. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 Akuntansi *Murabahah*. Jakarta: Pengarang

Nursoleha, S., Fuaziah, E., Fitriah, E., (2015). Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Dengan PSAK 105 (Studi Kasus Di BMT Khalifa Bandung). Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah. 2460-2159

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2016). Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Diakses dari website Pemerintah Provinsi Sumatera Barat: https://www.sumbarprov.go.id/images/1482118947-Perdep07_2016_Penilaian_Kesehatan_KSP_Syariah.pdf

Fitriah, P. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Banjarmasin (Skripsi, Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia). Diakses dari <https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id/uploads/attachment/attachment/fi7js8XE0cp46ZCIYmKTRq2QeyWPnhxgovkD9dbrGzU1aIt3LA.pdf>

Parno, Tikawati. (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada KPN IAIN Samarinda. *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal)*, 4(2), 2354-905X.

Ningsih, I.Y.S. (2011). Perlakuan Akuntansi *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 Pada BMT Al-Fath (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia). Diakses dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/2800/1/ITA%20YULIANA%20SETIA%20NINGSIH-FSH.pdf>

Alquran

Damanik, A. (2017). Urgensi Studi Hadis di UIN Sumatera Utara. *Shahih: Jurnal Kewahyuan Islam*.

Syafe'i, Z. (1997). *Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Tentang Kehujjahan Ijma' dan Pengingkarannya)*. Al-Qalam. No. 67/XIII/1997.

DSN MUI. (2000). *Fatwa Tentang Murabahah*. Diakses dari website Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_4_murabahah.pdf

Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Antonio, M.S. (2011). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press bekerjasama dengan yayasan Tazkia Cendekia.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia (edisi 4)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Perkasa.

Subiyanto, I. (2000). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.

Martono, N. (2016). Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.

Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif). Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Diakses dari <http://diskop.ntbprov.go.id/data/2016/08/Permen-KUKM-Nomor-14-Tahun-2015-ttg-Pedoman-akuntanai-USPPS-oleh-kop.pdf>